

**IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH  
DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Oleh:

**USWATINNISA**  
**10625003914**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru)”**.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat dan menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Selain itu ada prinsip yang harus diterapkan yaitu prinsip amanah. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syari’ah terutama perbankan syari’ah. Amanah ini adalah merupakan etika ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai luhur dalam hukum Islam. Penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Hal ini mengingat bahwa perbankan adalah sebuah lembaga yang mengelola dana publik yang harus amanah dalam menjalankan sistem operasioanalnya. Salah satu sumber pendanaan dari bank syariah adalah dari DPK (Dana Pihak Ke Tiga). DPK ini bersumber dari dana nasabah yang dapat berupa wadi’ah, mudharabah dan musyarakah. Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah pihak bank syari’ah sebagai pemegang amanah yang berupa dana titipan dari nasabah baik berupa wadi’ah atau mudharabah telah melaksanakan prinsip amanah ini ataukah hanya sebagai formalitas dalam akad semata.

Permasalahan yang dibahas adalah implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islamnya. Permasalahan timbul ketika nasabah tidak mengetahui bagaimana sistem perhitungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Pekanbaru dalam memberikan bagi hasil terhadap pengelolaan dana pihak ketiga dan akad yang digunakan dalam hal tersebut, sehingga mereka tetap berasumsi bahwa sistem dan akad yang digunakan sama dengan bank konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam analisa datanya adalah deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru telah mengimplementasikan konsep amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga.

Ulama fikih sepakat bahwa antara akad dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) dianggap amanah apabila dilakukan dengan terbuka dan berkeadilan tanpa ada unsur paksaan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pengelolaan dana pihak ketiga tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

### **BAB II    PROFIL PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG PEKANBARU**

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia .....	12
B. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru .....	14
C. Visi dan Misi Serta Strategi Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia.....	16
D. Fungsi dan Tujuan .....	17
E. Struktur Organisasi.....	18
F. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia .....	31

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA**

A. Pengertian Amanah .....	39
B. Sistem Pengelolaan Dana pada Bank Syari'ah.....	49
C. Bentuk-bentuk Produk Bank Syari'ah.....	51
D. ....	v

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga .....	55
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga .....	68

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	78
B. Kritik dan Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>1</sup>

Umat Islam cukup lama menginginkan perekonomian yang berbasis pada penilaian-penilaian dan prinsip syari'ah untuk dapat diterapkan dalam aspek kehidupan bisnis. Banyak perekonomian yang tidak berpegang pada prinsip syari'ah yang melandasi operasional-operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Maka dengan ini prinsip-prinsip syari'ah perlu kita tegakkan pada lembaga keuangan dengan sistem perbankan syari'ah berkaitan dengan terbentuknya sistem ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1 h. 85.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), Cet. Ke-3, h. 1.

Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dunia perbankan di Indonesia pada saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat. Dengan jumlah bank yang sangat banyak, perbankan harus melakukan banyak inovasi dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Umumnya berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.<sup>3</sup>

Ada unsur moral yang harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap transaksi dalam perbankan syariah khususnya. Prinsip itu adalah prinsip amanah. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syaria'ah terutama perbankan syaria'iah.

Dalam pengelolaan dana pihak ketiga ini penerapan prinsip amanah sangatlah diperlukan karena ini berkaitan dengan kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana mereka pada bank tersebut.

Pada bank yang berbasis syaria'ah, maka dalam pengelolaan dana pihak ketiga ini harus disesuaikan dengan lima segi religious yaitu:

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat

---

<sup>3</sup> Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, ( Jakarta: Indeks, 2006), Cet. Ke-1, h. 59.

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
5. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam)<sup>4</sup>

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus yaitu hubungan kepercayaan (*amanah/fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)<sup>5</sup>.

Selain meletakkan asas-asas akad yang sangat kuat dan kokoh di atas, teori ekonomi Islam juga mengantisipasi kemungkinan terjadi ekonomi yang menyimpang dan diharamkan, yakni yang di dalamnya terkandung unsur penipuan, unsur pemaksaan, keharaman dan kemaksiatan.<sup>6</sup>

Pada sisi penghimpunan dana bank haruslah memperhatikan perhitungan bagi hasil yang tepat dan adil karena simpanan nasabah tidak pernah tetap, ini tidak terlepas dari tenaga profesional yang handal, agar tidak ada kekeliruan dalam perhitungan bagi hasil.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Latifa Algaoud, Mervyn Lewis, *Perbankan Syari'ah*, ( Jakarta: Serambi, 2001), Cet. Ke-1, h. 48.

<sup>5</sup> Wibowo Edi, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), Cet. Ke-1, h. 71.

<sup>6</sup> Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), Cet 1, h. 26.

<sup>7</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), Cet. Ke-1, h. 57.

Dalam menjalankan operasioanalnya Bank syari'ah dituntut untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Hal ini mengingat bahwa perbankan adalah sebuah lembaga yang mengelola dana publik yang harus amanah dalam menjalankan sistem operasioanalnya. Salah satu sumber pendanaan dari bank syariah adalah dari DPK (Dana Pihak Ke Tiga). DPK ini bersumber dari dana nasabah yang dapat berupa wadi'ah, mudharabah dan musyarakah. Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah pihak bank syari'ah sebagai pemegang amanah yang berupa dana titipan dari nasabah baik berupa wadi'ah atau mudharabah telah melaksanakan prinsip amanah ini ataukah hanya sebagai formalitas dalam akad semata.

Sebagai bank yang dikenal murni syari'ah, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru pastinya juga melakukan pengelolaan Dana Pihak ketiga yakni dengan memberikan berbagai jenis produk pembiayaan, bagi hasil, sewa dan jasa. Terlebih yang paling diperhatikan adalah bagi hasil terhadap pengelolaan dana pihak ketiga tersebut. Sebagai contohnya, pak Rahman mempunyai simpanan pada Bank Muamalat Pekanbaru dalam bentuk deposito, jangka waktu 12 bulan, plafon Rp. 25.000.000,-. Dalam pembagian hasilnya, bank muamalat memberikan bagi hasil sebesar 54% dengan nilai HI-1000 adalah 9,74. Setelah melakukan perhitungan pada saat jatuh tempo pak Rahman akan mengambil simpanannya pada Bank Muamalat



Pekanbaru dengan jumlah Rp. 25.131.490,- dengan rincian plafon pak Rahman sebesar Rp. 25.000.000 ditambah bagi hasil sebesar Rp. 131.490,-.

Permasalahan timbul ketika nasabah tidak mengetahui bagaimana sistem perhitungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Pekanbaru dalam memberikan bagi hasil terhadap pengelolaan dana pihak ketiga dan akad yang digunakan dalam hal tersebut, sehingga mereka tetap berasumsi bahwa sistem dan akad yang digunakan sama dengan bank konvensional dan yang membedakannya hanyalah bahasa saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah. Penelitian ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)”**.

## **B. Permasalahan**

### **1. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, sebagai panduan dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan dan informasi mengenai implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.
- b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Prodi Perbankan Syari'ah, UIN SUSKA Riau.
- c. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan pendidikan yang sama.

## D. Metode Penelitian

### 1. Lokasi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamat di jalan. Jend. Sudirman No. 417-419 karena PT. Bank Muamalat merupakan Bank yang dipercaya masyarakat menggunakan prinsip syari'ah dari pertama berdiri atau tidak menggunakan *system dual banking*.

### 2. Subjek dan Objek

#### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yakni sebanyak 34 orang dan nasabah Dana Pihak Ketiganya sebanyak 1.453 orang. Jadi, total populasinya adalah 1.487 orang.<sup>8</sup> Karena jumlah populasi ini sangat besar untuk dijadikan sampel penelitian, maka penulis mengambil 12 orang saja sebagai sampel atau 1,2 % dari keseluruhan jumlah populasi dengan menggunakan teknik random sample.

**4. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian terhadap pegawai, nasabah dan kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

---

<sup>8</sup> Data PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru tahun 2008-2010.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## **5. Teknis Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.
- c. Studi dokumentasi yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Metode Induktif**

Metode induktif adalah menggambarkan data-data khusus untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 2. Metode Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini ditemukan latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG BANK**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum bank yang berisikan pemaparan tentang sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, visi dan misi serta strategi usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, fungsi dan tujuan, struktur organisasi dan produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia.

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang konsep amanah dalam Islam, sistem penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan bentuk-bentuk produk penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK).

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

**BAB II**  
**PROFIL PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG**  
**PEKANBARU**

**A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia adalah inisiator, pionir dan bank pertama murni Syariah di Indonesia. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk (Bank) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H, No. 1 Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A. Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terakhir dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H, No. 24 tanggal 18 September 2003, khususnya mengenai perubahan modal dasar Bank Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-03065. HT.01.04.Th.2004 tanggal 10 Februari 2004.<sup>1</sup>

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Perseroan telah

---

<sup>1</sup> *Good Corporate Governance Implementation Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008*, hal. 4.



memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Perseroan dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR Sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengamalan perbankan yang sesuai kaidah syariah. Bank ini didirikan dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh Pengusaha Indonesia serta pemerintah Indonesia dan dimiliki oleh lebih dari 800.000 pemegang saham perorangan di Indonesia, Islamic Development Bank (IDB) sebagai representasi masyarakat dan negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta lembaga-lembaga keuangan Islam Internasional.<sup>2</sup>

Alhamdulillah, BMI merupakan satu-satunya bank syariah yang berhasil melewati krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, tanpa membebani Negara, tanpa memperoleh obligasi dan atau program recapitalisasi. Bank ini memberikan pelayanan perbankan nasional dan internasional, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif. Misinya adalah untuk menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi para stakeholders. Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank mendirikan yayasan Baitul Mal Muamalat yang kemudian disahkan berdasarkan akta Notaris Atrino Leswara, SH, No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama dengan No. 48/2001, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana qardhul hasan. Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta 10220. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, Bank memiliki 47 cabang, 13 cabang pembantu, 83 kantor kas dan 47 gerai.<sup>3</sup>

#### **B. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru**

Sejak Oktober tahun 1999 sebenarnya telah berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru yang berkantor di Mutiara Merdeka Hotel. Tetapi belum beroperasi sebagaimana layaknya Bank-bank lain baru pada tahap promosi dan informasi (Muamalat Business Center). Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru diresmikan pada tanggal 4 Mei 2000 dengan akte notaries pendirian nomor 16 oleh Gubernur Riau yang pada waktu itu jabatan dipegang oleh H. Saleh Djasit, S.H, yang disaksikan

---

<sup>3</sup> *Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009*, hal. 6.

langsung oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat, para ulama, cendekiawan dan sebahagian besar masyarakat muslim negeri lancing kuning yang selama ini menanti dibukanya Bank dengan system syari'ah.<sup>4</sup>

Pembukaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru merupakan tindak lanjut dari respon positif dari masyarakat Medan dan sekitarnya terhadap system operasi bank syari'ah pada tanggal 17 April tahun 2000 silam. Selain hal di atas, ada beberapa faktor yang memotivasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk membuka cabang di Pekanbaru diantaranya:

1. Merupakan strategi bank untuk memperluas jaringannya.
2. Populasi masyarakat Riau yang mayoritas merupakan Muslim.
3. Permintaan masyarakat Riau itu sendiri.
4. Prospek perkembangan ekonomi di Riau yang menjanjikan.<sup>5</sup>

Pada awal berdirinya bank Muamalat Indonesia di Pekanbaru, bank ini hanya memiliki nasabah dengan jumlah 2.500 orang untuk wilayah Pekanbaru dengan jenis produk yang dipasarkan antara lain tabungan Arafah, tabungan Ummat, Deposito, Giro dalam bentuk dollar maupun rupiah, dan pembiayaan lainnya. Pada masa selanjutnya muamalat berkembang dengan bertambahnya jumlah nasabah dan jenis produk lainnya, seperti keluarnya suatu produk yang sangat canggih yang belum pernah ada di Indonesia dan dunia yaitu produk Shar-e, yang dibuka tanggal 10 Oktober 2004 di Jakarta.

---

<sup>4</sup> Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru, *Dokumentasi*, Tahun 2009.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru memasuki bidang baru dengan membiayai pemilikan rumah sejak April 2007. Bisnis perumahan atau KPRS (Kongsi Pemilikan Rumah Syari'ah) menggunakan *skim musyarakah* dan *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) setelah sebelumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa) menjadi *musyarakah* (kemitraan) sejak Mei 2007 lalu.<sup>6</sup>

### C. Visi dan Misi Serta Strategi Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia

#### 1. Visi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah :

"Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional."

#### 2. Misi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah :

"Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai baik *stakeholder*."

#### 3. Strategi usaha Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Beberapa strategi usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- a. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent dengan penekanan kepada usaha kecil dengan manfaat jaringan lembaga keuangan syari'ah tanpa mengabaikan pembiayaan pada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan yang mendukung usaha kecil.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan mutu produk andalan.
- c. Meningkatkan kualitas profesional sumber daya insani.
- d. Meningkatkan jumlah kantor pelayanan baru pada daerah-daerah strategis.
- e. Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan.
- f. Meningkatkan intensitas pengawasan dan penumbuhan budaya patuh terhadap peraturan.<sup>7</sup>

#### **D. Fungsi dan Tujuan**

Bank Muamalat Indonesia mempunyai tugas yang sama dengan bank konvensional, yaitu memegang fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi disini maksudnya bank Muamalat Indonesia merupakan perantara antara pihak-pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang mengalami deficit dana.

Dalam melaksanakan kegiatan utamanya, bank Muamalat Indonesia berbeda dengan bank konvensional. Bank Muamalat Indonesia dalam

---

<sup>7</sup> *Annual Report, op.cit.*, hal. 10.

melaksanakan aktivitasnya langsung menyediakan kebutuhan nasabah yang diperlukan dan sesuai dengan aturan muamalah dengan koridor bagi hasil.

Sedangkan tujuan bank Muamalat Indonesia sama dengan tujuan bank umum lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan bank Muamalat Indonesia dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.

Adapun tujuan pengembangan bank syari'ah yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komperatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih memperhatikan unsure moral.<sup>8</sup>

#### **E. Struktur Organisasi**

Perusahaan atau suatu badan organisasi secara umum mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses perencanaan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta sesuai mencerminkan unsure kejelasan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dalam struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi dalam menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi kebijakan yang selaras dengan upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif.

Struktur organisasi juga mempermudah pemimpin untuk mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu juga akan memperjelas jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa bawahannya.<sup>9</sup>

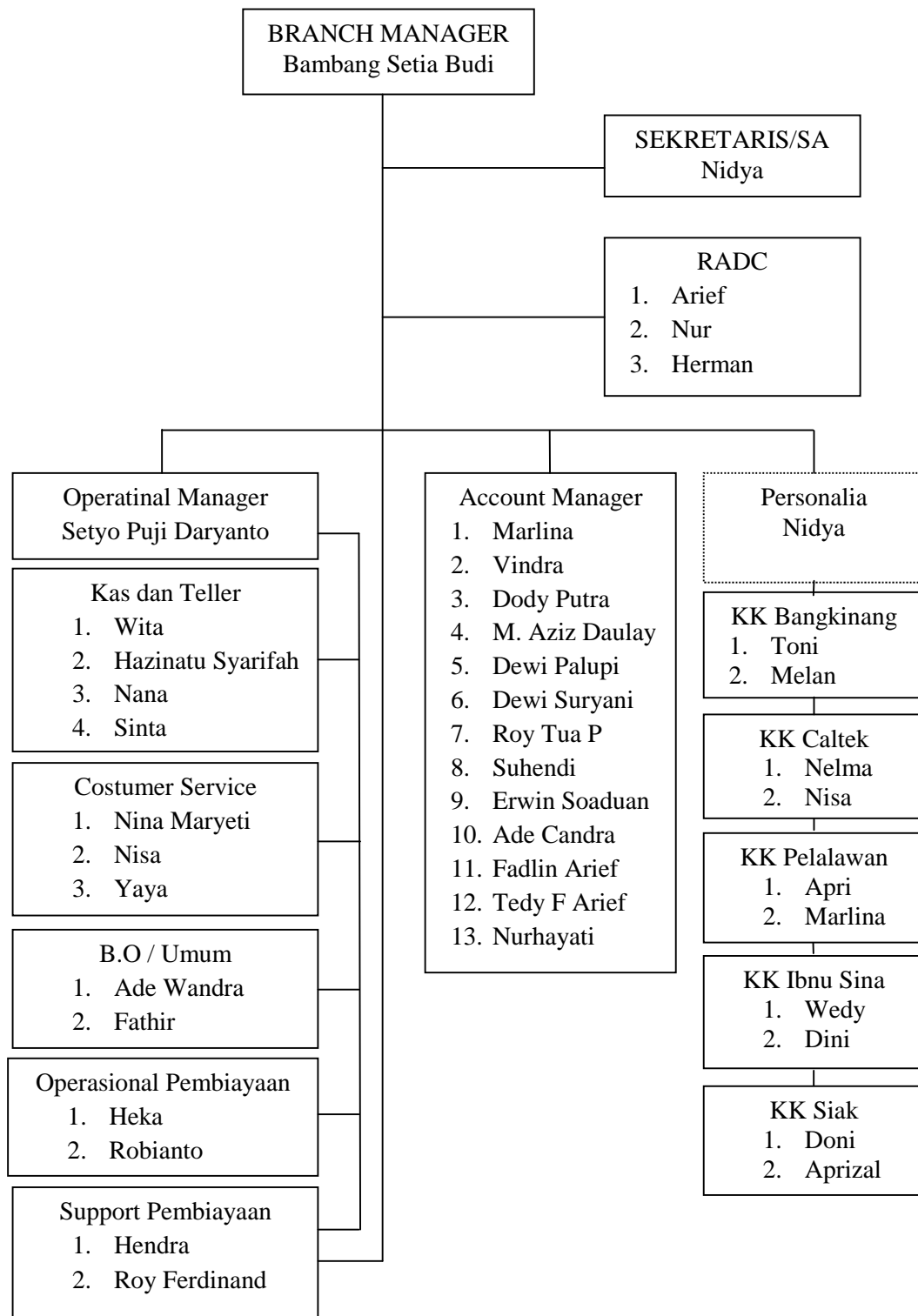
PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru sebagai suatu organisasi, dalam suatu kegiatannya telah merumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab personil maupun bagian-bagian kegiatan secara bersama mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG PEKANBARU**  
**PERIODE JULI 2010**



*Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru Tahun 2010*



Adapun tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada struktur organisasi tersebut antara lain:

1. Pimpinan Cabang<sup>10</sup>

- 1.1. Bertanggungjawab atas jalannya operasi perbankan pada kantor cabang sesuai program kerja dan pedoman kerja operasi bank.
- 1.2. Bertindak untuk dan atas nama direksi kantor cabang dengan berdasarkan surat kuasa yang diterima dari direksi.
- 1.3. Memimpin dan mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- 1.4. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat kantor cabang dan mengadakan kantor cabang dan mengadakan pertemuan atau diskusi untuk pengembangan usaha atau peningkatan efisiensi kerja.
- 1.5. Melaksanakan kegiatan teknis cabang yang berdasarkan pedoman kerja operasional.
- 1.6. Berwenang untuk memutuskan atau member persetujuan pada setiap masalah yang muncul.
- 1.7. Mengamankan kerahasiaan bank dan inventaris yang terdapat pada kantor cabang.
- 1.8. Membuat perencanaan secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam kerja untuk disampaikan ke kantor pusat.
- 1.9. Menerima dan menetapkan karyawan sebagaimana yang ditentukan dalam struktur organisasi serta bertanggungjawab terhadap direksi.

---

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Pedoman Operasional Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1992), hal. 6.

## 2. Sekretaris dan Personalia<sup>11</sup>

- 2.1. Mengatur terlaksananya tertib administrasi umum dan personalia pada tingkat cabang.
- 2.2. Menyiapkan bahan material untuk kebutuhan dan kelancaran aktifitas cabang.
- 2.3. Mengatur terselenggaranya surat-surat masuk dan keluar di tingkat cabang.
- 2.4. Membantu pemimpin cabang dalam menyelesaikan surat-surat ke kantor pusat Bank Indonesia, nasabah dan instansi lainnya.
- 2.5. Mengatur penyampaian ke kantor pusat dan Bank Indonesia agar laporan tiba pada waktunya.
- 2.6. Menyiapkan dan melaksanakan:
  - 2.6.1. Pembiayaan gaji, lembur, sumbangan-sumbangan, dan insentif lainnya.
  - 2.6.2. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setiap bulannya.
  - 2.6.3. Pembayaran ASTEK.
  - 2.6.4. Analisis jabatan untuk penentuan jumlah karyawan yang dibutuhkan.
  - 2.6.5. Seleksi penerimaan karyawan baru.
  - 2.6.6. Pengarsipan yang baik.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 2.7. Membuat laporan yang menyangkut bidang administrasi umum personalia antara lain:
  - 2.7.1. Gaji honor atau lembur.
  - 2.7.2. Disiplin karyawan.
  - 2.7.3. Absensi karyawan dan pelaksanaan cuti.
- 2.8. Bertanggungjawab terhadap ketertiban administrasi perjanjian kerja, menyelesaikan permasalahan perburuhan, dengan instansi pemerintah yang berwenang, kebersihan kantor, dan keamanan kantor, pelaksanaan keamanan terhadap keperluan kantor, alat cetak, terutama buku, ceque, atau bilyet giro, deposito dan lain sebagainya.
- 2.9. Membuat, mengatur dan mengawasi file personalia masing-masing karyawan dan memelihara kelengkapan datanya termasuk aspek pembinaan, persediaan alat keperluan kantor, kartu peredaran barang, dan mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan pemakaian barang.
- 2.10. Melaksanakan pengarsipan dan file yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- 2.11. Memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota bagian umum, satpam, office boy/girl.
- 2.12. Bertanggungjawab terhadap pimpinan cabang.

### 3. Manager Operasi<sup>12</sup>

- 3.1. Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sesuai struktur organisasi.
- 3.2. Turut bertanggungjawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik.
- 3.3. Dapat mewakili pimpinan cabang ketika pemimpin cabang berhalangan.
- 3.4. Memberikan pertimbangan serta usul kongkrit kepada pemimpin cabang untuk pengembangan cabang.
- 3.5. Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat-surat berharga, surat keluar masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
- 3.6. Memimpin rapat intern, membina dan meningkatkan keterampilan karyawan, bertanggungjawab terhadap tegaknya disiplin karyawan dan ketertiban administrasi.
- 3.7. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerja seksi layanan dank as, serta operasi.
- 3.8. Bertanggungjawab kepada pimpinan cabang.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### 4. Manager Akuntan<sup>13</sup>

- 4.1. Melaksanakan sistem pembukuan berdasarkan atas pedoman kegiatan operasional cabang dan pencatatan secara tertib, lengkap, dan sistematis yang berhubungan dengan kekayaan, kewajiban, pendapatan, pembiayaan untuk dituangkan dalam neraca harian dan laporan bulanan.
- 4.2. Membuat dan memelihara buku besar, buku harian, dan buku tambahan.
- 4.3. Menyiapkan laporan pembukuan ke kantor pusat dan Bank Indonesia.
- 4.4. Melaksanakan pengarsipan yang berhubungan dengan masalah pembukuan secara tertib, baik dan terjamin kerahasiaannya.
- 4.5. Melakukan penyusutan atas investasi yang berada di kantor cabang.
- 4.6. Melaksanakan pengarsipan filling yang berhubungan dengan pembukuan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota pembukuan.
- 4.7. Bertanggungjawab kepada pemimpin cabang.

#### 5. Seksi *Support* Pembiayaan<sup>14</sup>

- 5.1. Menjelaskan data dari account manager untuk dilaksanakan proses pembiayaan asuransi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 5.2. Menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan berdasarkan pada buku pedomankerja operasional cabang.
- 5.3. Melakukan penilaian dan analisa atas permohonan pembiayaan dan mengajukan rekomendasi kepada pimpinan cabang.
- 5.4. Melakukan pengawasan secara fisik atas agunan yang menurut sifatnya harus diasuransikan.
- 5.5. Mengadakan penilaian serta mengadakan pengecekan keaslian atas surat-surat jaminan.
- 5.6. Melakukan pemeriksaan terhadap debitur.
- 5.7. Melaksanakan penagihan terhadap debitur atas kewajiban yang harus dilunasi.
- 5.8. Memberi jawaban atas informasi kepada bank lain dalam hubungan dengan permohonan pembiayaan.
- 5.9. Membuat tanda terima penyerahan atau penerimaan surat-surat jaminan.
- 5.10. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad (kesepakatan) pembiayaan dan pengikatan jaminan di *notaries*.
- 5.11. Meminta laporan perkembangan usaha, melakukan *on the spot* terhadap usaha debitur.
- 5.12. Membuat surat-surat peringatan dan teguran kepada debitur yang lalai memenuhi kewajiban.
- 5.13. Melaksanakan sistem administrasi pembiayaan yang baik dan tertib.
- 5.14. Membuat laporan-laporan ke kantor pusat maupun Bank Indonesia.

- 5.15. Melaksanakan pengarsipan dan filing yang berhubungan dengan pembiayaan.
- 5.16. Membuat dan mengatur pengiriman dan penyampaian rekening-rekening yang tergolong kurang lancer, diragukan dan macet, surat-surat panggilan atau peringatan terhadap debitur-debitur yang akan jatuh tempo.
- 5.17. Menguasai secara fisik jaminan debitur macet.
- 5.18. Memimpin dan mengawasi pekerjaan semua anggota bagian pembiayaan.
- 5.19. Bertanggungjawab kepada pemimpin cabang.
- 6. Seksi Data Kontrol<sup>15</sup>
  - 6.1. Memeriksa transaksi dari bagian operasi teller, kas dan *account*.
  - 6.2. Membuat laporan-laporan LBU ke Bank Indonesia.
  - 6.3. Menyediakan laporan bulanan akhir tahun dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan data serta saran atau usul ke pimpinan cabang.
  - 6.4. Bertanggungjawab kepada pemimpin cabang.
- 7. Seksi Operasi<sup>16</sup>
  - 7.1. Menjalankan kliring, sarana logistic dan operasi pembiayaan.
  - 7.2. Melayani nasabah yang membuka rekening giro dan menerima kelengkapan kerja operasional bank.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 7.3. Melayani setiap nasabah yang memerlukan buku ceque atau bilyet giro baru dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 7.4. Mempertanggungjawabkan pengambilan dan penjualan buku bilyet giro, buku setoran kepada nasabah.
- 7.5. Meneliti keaslian bilyet giro serta keberadaan tanda tangan nasabah sesuai specimen yang ada, cukup tidaknya saldo yang bersangkutan sebelum dilakukan pembiayaan oleh kasir.
- 7.6. Membuat slip pembebanan harga buku bilyet giro, biaya administrasi pembukuan rekening dan lain-lain sesuai dengan pedoman kerja.
- 7.7. Meneliti nota pemberitahuan tentang pendebitan atau pembiayaan rekening nasabah.
- 7.8. Melaksanakan kliring terhadap surat-surat berharga berupa bilyet giro, wesel, nota debit atau kredit sesuai dengan pedoman kerja operasional bank dan surat edaran Bank Indonesia.
- 7.9. Menerima setoran kliring, mencatat penerimaan kliring dan membuat daftar kliring.
- 7.10. Menyampaikan dan memberitahukan segera kepada nasabah atas setoran kliring atas setiap bulan.
- 7.11. Menyerahkan dan menerima warkat kliring pada lembaga kliring serta menyelesaikan administrasi penyerahan dan penerimaan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan.
- 7.12. Membuat laporan hasil pertemuan kliring pada setiap bulan.



- 7.13. Menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap neraca kliring setiap hari.
- 7.14. Melaksanakan pengarsipan dan filling yang menyangkut masalah kliring.
- 7.15. Membuat surat peringatan kepada nasabah yang menarik bilyet giro kosong.
- 7.16. Bertanggungjawab kepada Manager Operasi.
- 8. Seksi Pelayanan dan Kas<sup>17</sup>
  - 8.1. Menerima setoran, tarikan, dan transfer dari nasabah.
  - 8.2. Memberikan informasi kepada nasabah tentang bank.
  - 8.3. Melayani kebutuhan nasabah.
  - 8.4. Menghitung dan membebankan biaya transfer kepada pemberi amanat atau rekening nasabah.
  - 8.5. Melaksanakan dan memcocokkan perhitungan transfer antara cabang dan kantor kas.
  - 8.6. Menerima dan menghitung kebenaran setoran nasabah dan membukukan ke rekening nasabah.
  - 8.7. Memberikan perincian kas tiap hari setelah kas tutup.
  - 8.8. Mamasukkan atau mencatat semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam rekening nasabah.
  - 8.9. Bertanggungjawab atas penyampaian bukti atas pengiriman uang kepada si pemberi amanat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

- 8.10. Bertanggungjawab atas jumlah fisik uang tunai yang berada dalam ruangan kasir selama kas dibuka, atas kekurangan fisik uang tunai.
- 8.11. Melaksanakan pembayaran atas surat-surat berharga setelah di cek kebenaran tanda tangan oleh bagian giro atau pegawai yang ditunjuk untuk itu.
- 8.12. Memelihara arsip yang berhubungan dengan kas harian dan perincian kas edaran Bank Indonesia.
- 8.13. Mengelola pelaksanaan tebungan sesuai dengan pedoman kerja operasional dan surat edaran Bank Indonesia.
- 8.14. Bertanggungjawab atas pengambilan dan penyetoran penabung, keamanan dan kerahasiaan contoh tanda tangan penabung.
- 8.15. Mengadakan atau melaksanakan ketertiban administrasi penabung, arsip dan *system filling* yang berhubungan dengan tabungan.
- 8.16. Membuat perhitungan bagi hasil (*al-Mudharabah*) dan membukukan ke dalam buku tabungan disesuaikan dengan buku pedoman kerja operasional cabang dan sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia.
- 8.17. Melaksanakan pengarahana dana secara efektif.
- 8.18. Menolak pelaksanaan deposito sesuai dengan pedoman operasional cabang.
- 8.19. Melayani penerimaan deposito dan pembayaran bagi hasil (*al-Mudharabah*) pada waktunya serta melaksanakan sistem administrasi yang baik.
- 8.20. Bertanggungjawab kepa Manager Operasi.

## **F. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia**

Di dalam melaksanakan aktivitasnya, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru tidak berbeda dengan bank konvensional dan bank syari'ah lainnya. Perbedaan produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dengan bank syari'ah lainnya terletak hanya pada nama produk yang dipasarkan. Perbedaan dengan bank konvensional adalah terletak pada:

1. Akad, dimana pada bank syari'ah semua transaksi harus berdasarkan pada akad yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, sedangkan pada bank konvensional transaksi tidak didasarkan pada akad.
2. Imbalan yang diberikan, pada bank syari'ah imbalan berupa bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memberikan imbalan berupa bunga.
3. Sasaran kredit, dana yang berasal dari nasabah pada bank syari'ah disalurkan berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip syari'ah dan prinsip keuntungan, artinya penyaluran dana tersebut harus mengikuti kriteria syari'ah Islam.<sup>18</sup>

Adapun jenis-jenis produk dan jasa perbankan yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru kepada masyarakat terdiri atas produk pengumpulan dana, penyaluran dana dan produk jasa perbankan. Berikut uraian dari produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia:

---

<sup>18</sup> *Annual Report, op.cit*, hal. 97.

# 1. Produk penghimpunan dana, terdiri dari:

## 1.1. Tabungan muamalat

### 1.1.1. Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor layanan Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Selain itu, nasabah tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif perbulannya.<sup>19</sup>

### 1.1.2. Tabungan Ummat Junior

Yaitu tabungan khusus untuk pelajar.

### 1.1.3. Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa secara cuma-cuma

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal dunia. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung on-line dengan Siskohat Departemen Agama. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.<sup>20</sup>

#### 1.1.1. Tabungan Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan Investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000. Shar-e adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 1.1.2. TabunganKu

Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya.

1.1. Giro *wadi'ah*, yaitu Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.

1.1.1. Giro *wadi'ah* personal (untuk perorangan)

1.1.2. Giro *wadi'ah* korporasi (untuk perusahaan)

### 1.2. Deposito

#### 1.2.1. Deposito *mudharabah*

Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang disimpan pada Deposito Mudharabah akan dikelola melalui pembiayaan kepada berbagai jenis

usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.

#### 1.2.2. Deposito *fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito Fulinves memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal.

### 2. Produk penyaluran dana, yaitu:

#### 2.1. *Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.

## 2.2. *Istishna*

Adalah jual beli dimana produsen (shaani') ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni'). Istishna' mirip dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran Istishna' dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhirpesanan. Konsep Istishna' cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau asset yang memiliki kriteria spesifik.

## 2.3. *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian.

## 2.4. *Mudharabah*

Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.



### 2.5. *Musyarakah*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.

### 2.6. *Al-Bai'u Bitsaman Ajil*

### 2.7. *Al-Qardhul Hasan*<sup>22</sup>

## 3. Produk jasa perbankan, antara lain:

### 3.1. Jual beli valuta asing (*al-Sharf*)

### 3.2. Bank garansi (*al-Kafalah al-Dhamanah*)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Konsep kafalah biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi.

### 3.3. Jasa penerbitan L/C (*al-Wakalah*)

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

(sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip wakalah biasa digunakan untuk layanan L/C collection, agency, dan arranger sindikasi pembiayaan.

3.4. Jasa transfer

3.5. Jasa pengiriman uang<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA**

##### **A. Pengertian amanah**

Implementasi menurut bahasa adalah penerapan, sedangkan menurut istilah adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.<sup>1</sup> Prosesnya yaitu berbentuk pantauan kegiatan harian dalam pelaksanaan kebijakan dan penilaian kegiatan dan kepuasan klien atau nasabah dengan layanan yang diberikan.

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur didalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.<sup>3</sup>

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina - amanatan*) yang berarti *jujur* atau *dapat dipercaya*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti *pesan, perintah, keterangan* atau *wejangan* <sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-1, h. 124.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-1, h. 33.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Habib Nazir dan Muh.Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* (Kaki Langit, 2004), h. 20.

Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya<sup>5</sup>. Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya<sup>6</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.

Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban<sup>7</sup>.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu:

1. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan

---

<sup>5</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2 (Dar al-Fikr, tt.), h.70.

<sup>6</sup> Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Araby, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1 (Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt.), h.449.

<sup>7</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, jilid 5 (Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt.), h.170.

semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.

2. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkuat keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.
3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun

dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat<sup>8</sup>.

### **1. Amanah dalam Muamalah**

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia.

Aspek muamalah merupakan bagian prinsip dalam Islam karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian muamalah menjadi sangat penting. Dalam sebuah hadis dinyatakan "*Agama itu adalah muamalah*".

Manusia menurut ajaran Islam adalah khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam hidup di tengah manusia yang dinamis. Kehidupan damai tidak serta merta, akan tetapi diciptakan dan dirancang. Oleh karena itu perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat untuk menciptakan perdamaian tersebut.

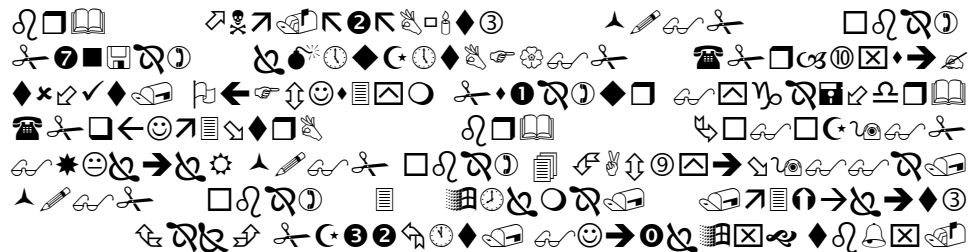
Amanah (*trust*) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai

---

<sup>8</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *op.cit.* h.70.

landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 58 sebagai berikut :



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>9</sup>(QS. An-Nisa': 58)

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin.

Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S.23:8 yaitu:

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 69.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ ۚ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۖ لِقَدْ إِتَقَنَّا رَبَّنَا فَاغْنَاهُ عَنِ الْغَدْرِ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ

Artinya: *"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."*<sup>10</sup>(QS. Al-Mukminun: 8)

sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat orang munafik (*hifokrit*).

Firman Allah dalam Q.S. Yusuf (12) : 52 sebagai berikut:

يُوسُفُ ۙ إِذْ قَالَ لِأَسْفَحَ ۖ قَالَ لَا ۚ قَالَ فَأَدْبَرَ الْفَصْلَ ۖ وَلَمْ يَكُن لَّهُ الْفَأْسُ ۚ وَتَوَلَّىٰ وَكَانَ الْكَافِرُ ۚ

Artinya: *"(Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa Sesungguhnya Aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."*<sup>11</sup>(QS. Yusuf: 52)

Dalam fiqh Islam, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti *al-wadi'ah* dan *ariyah*<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 273.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 192.

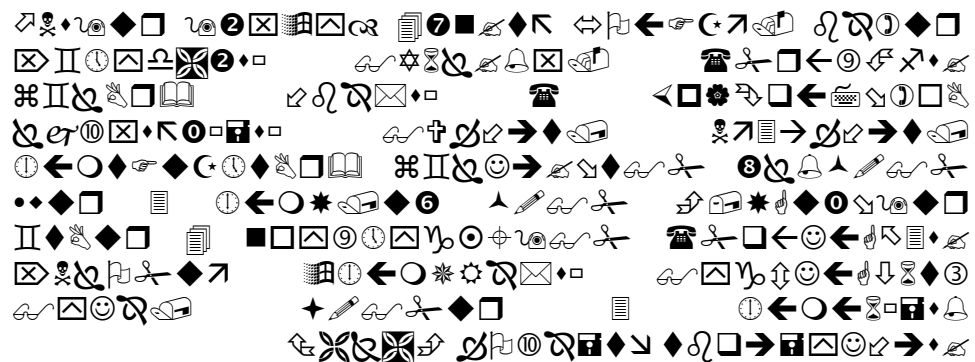
<sup>12</sup> Habib Nazir dan Muh.Hasanudin, *op.cit.* h.20.



*Al-wadi'ah* adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan *ariyah* adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun<sup>13</sup>.

Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk *wadi'ah* maupun *ariyah* diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya.

Apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya Q.S. al-Baqarah (2) : 283.



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

<sup>13</sup> Ibid.

*hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>14</sup>(QS. al-Baqarah: 283)

Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Dalam hukum muamalah termasuk katagori amanah adalah *wadi'ah*, *luqatah*, *rahn*, *ijarah* dan *ariyah*<sup>15</sup>.

Dalam melaksanakan amanah dari lima macam amanah tersebut di atas, terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu :

1. *Wadiah*, barang titipan disampaikan kepada pemiliknya apabila pemiliknya meminta barang titipan tersebut.
2. *Luqathah*, barang temuan (*luqatah*) diumumkan selama satu tahun di tempat yang sekiranya dapat diketahui oleh masyarakat umum dengan harapan orang yang memiliki barang yang ditemukan tersebut mengetahuinya. Apabila setelah diumumkan dalam jangka satu tahun tidak ada yang memilikinya, maka barang tersebut boleh digunakan. Dan apabila setelah digunakan ternyata pemiliknya ada, maka harus membayar/mengganti dengan barang sejenisnya atau harganya.
3. *Rahn* (gadai/jaminan), barang yang menjadi jaminan atas hutang diberikan kepada pemiliknya apabila pemilik barang (*rahn*) tersebut telah melunasi hutangnya.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>15</sup> Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Araby, *op.cit.* h.450.

4. *Ijarah* dan *ariyah*, apabila telah selesai pekerjaan dan penggunaan barang, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sebelum diminta oleh pemiliknya<sup>16</sup>.

Dalam perdagangan dikenal istilah *menjual dengan amanah*, seperti menjual "*murabahah*". Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya<sup>17</sup>.

Amanah merupakan unsur yang amat vital dan sangat urgen keberadaanya dalam kelangsungan roda perekonomian, karena bencana terbesar di dalam pasar dewasa ini adalah meluasnya tindakan manipulasi, dusta, batil, khianat, bahkan menzalimi orang dengan perdagangan yang dilakukan, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang (*taghrir*), mudah bersumpah, menimbun stok barang demi keuntungan pribadi, mengadakan persekongkolan jahat untuk memperdaya konsumen (*tamajil*), menyembunyikan kerusakan barang (*tadlis*) dan sebagainya. Pada hakikatnya perdagangan yang demikian disibukkan oleh laba kecil dari pada laba besar, terpaku kepada keberuntungan yang fana dari pada keberuntungan yang kekal.

حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعه، عن أبيه عن جده؛ أنه خرج مع النبي صلى الله عليه

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Habib Nazir dan Muh.Hasanudin, *op.cit.* h.20.

. فرأى الناس يتبايعون فقال "يا معشر التجار!"

الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. "إن التجار يبعثون

يوم القيامة فجارا."

Artinya: Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau ke luar rumah dan melihat komunitas manusia sedang bertransaksi jual beli. Beliau berseru, wahai para pedagang! Pandangan para pedagang langsung terarah kepada beliau, Nabipun melanjutkan perkataannya, sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, berbuat baik dan benar<sup>18</sup> (HR. Tirmizi).

Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*mudharabah*) atau *wakalah* (menitipkan barang barang untuk menjalankan proyek yang disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama, jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemalahatan atau keuntungan pihaknya tanpa memikirkan kemaslahatan atau keuntungan pihak lain, maka ia telah berkhianat.

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Mewabahnya korupsi, monopoli dan oligapoli dalam berbagai lapangan kerja dan sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, hilangnya saling percaya, tumbuhnya saling mencurigai (*negative thinking*),

---

<sup>18</sup> Sunan at-Turmuzi, *Kitab al-Buyu'*, No. 1228.

menjamurnya mental hipokrit, apriori terhadap tugas dan kewajiban dan sifat-sifat tercela lainnya sebagai akibat dari hilangnya amanah.

## **B. Sistem Pengelolaan Dana pada Bank Syari'ah**

Saat ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme/prosedur dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai ')
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal I angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

---

<sup>19</sup> Kajian Hukum Pradjoto & Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, 2006

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai pembiayaan syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 25 yaitu :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sistem penghimpunan dana dalam istilah perbankan disebut *funding*. Dalam perbankan syari’ah, penghimpun dana disebut *shahib al-maal*. Bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah*

dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning asset*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagihasilkan antara bank dengan pemilik DPK.<sup>20</sup>

Keynes mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu transaksi, cadangan (jaga-jaga) dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.<sup>21</sup>

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>22</sup>

## C. Bentuk-bentuk Produk pada Bank Syari'ah

### 1. *Prinsip Wadi'ah*

*Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan

---

<sup>20</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet. 3, h. 47.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, *loc.cit.*,

dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>23</sup>

*Wadi'ah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan.
- b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan. Keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak yang dititipkan.<sup>24</sup>

*Wadi'ah* diterapkan dalam produk rekening giro di perbankan syari'ah. Produk ini disifati dengan *yad dhamanah*, Implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Firdaus, *op.cit.*, hal. 36

<sup>24</sup> Slamet Wijono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), cet. 3, h. 33.



dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.<sup>25</sup>

## 2. *Prinsip Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.<sup>26</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>27</sup>

Secara umum, *mudharabah* terbagi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthalaqah (Unrestricted Investment Account)*

---

<sup>25</sup> Adiwarman Karim, *op.cit.*, h. 108.

<sup>26</sup> Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 95.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan mudharabah muthalaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b. Mudharabah Muqayyadah (*Restricted Investment Account*)

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah / specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

*Mudharabah muqayyadah* terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2. *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipetuhi oleh bank dalam mencari bisnis.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **A. Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru**

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuai dengan fungsi bank di atas bahwa dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari masyarakat yang *surplus* dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syari'ah adalah untuk pengembangan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syari'ah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sector ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industry rumah tangga, perdagangan dan jasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet. Ke-2, hal. 7.

Dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru menetapkan beberapa tarif dalam pendanaannya, tariff tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tarif Pendanaan Yang Berlaku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia**  
**Cabang Pekanbaru**

**Deposito-Mudharabah Berjangka**

Keterangan	Deposito Rupiah	Deposito Valas
<b>Setoran Awal</b>		
<b>1. Deposito Mudharabah</b>		
Perorangan (1,3,6, dan 12 bulan)	Rp 1,000,000	USD 500
Perusahaan (1,3,6, dan 12 bulan)	Rp 1,000,000	USD 500
Prima	Rp 100,000,000	USD 10,000
<b>2. Deposito Fullinves (plus asuransi)</b>		
Perorangan berasuransi (6,12 bulan)	Rp 2,000,000	USD 500
Pencairan pada saat jatuh tempo	Free	Free
pencairan sebelum jatuh tempo	Biaya Administrasi Rp. 50.000,- dan tidak mendapat bagi hasil untuk jangka waktu bulanan	Biaya Administrasi USD 5 dan tidak mendapatkan bagi hasil untuk jangka waktu bulanan
Penerbitan bilyet baru	Free	Free
Ganti bilyet hilang / rusak	Rp. 50.000,- + surat keterangan hilang	USD 5 + Surat keterangan hilang

Keterangan	Giro Wadi'ah (IDR)	Giro Wadi'ah (USD)	Tabungan Mudharabah	Tabungan Haji Arafah	Tabungan Haji Arafah Plus	Shar-e
<b>Jumlah Setoran Awal</b>						
Perorangan	Rp 500,000	USD 500	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 1,500,000	Pembelian Kartu Shar-e Rp 125,000
Perusahaan	Rp 1,000,000	USD 1,000	-	-	-	-
Khusus an Bank	Rp 1,000,000	USD 1,000				
<b>Jumlah Setoran Berikutnya</b>	Tidak Dibatasi	Tidak Dibatasi	Tidak Dibatasi	Tidak Dibatasi	Rp 100,000	Tidak Dibatasi
Biaya Administrasi	Rp 10,000	USD 5	Rp 7,500	Tidak Ada	Saldo / bln < 2500000 = 5000	Rp 7,500

#### Limit Transaksi via ATM

Penarikan Tunai per hari	Rp 10,000,000	-	Rp 10,000,000	-	-	Rp 10,000,000
Pemindahbukuan per hari	Rp 50,000,000	-	Rp 50,000,000	-	-	Rp 50,000,000
Transfer per hari	Rp 25,000,000	-	Rp 25,000,000	-	-	Rp 25,000,000

#### Layanan ATM

Keterangan	Muamalat ATM	ATM Bersama	ATM BCA	Debet BCA
Penarikan Tunai	Free	Free	Free	-
Informasi Saldo	Free	Rp 3,000	Rp 3,000	-
Pemindahbukuan	Free	Rp 5,000	Rp 5,000	-
Transfer Antar Bank	Rp 5,000	Rp. 5000,- (khusus ATM bersama yang sudah memiliki layanan transfer antar bank)	-	-
Transaksi Belanja	-	-	-	Rp 3,000

Dari table di atas dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah jelas penggunaannya, jadi apabila terdapat potongan terhadap saldo tabungan nasabah itu dikarenakan adanya beban biaya atau administrasi yang ditanggung nasabah atas transaksi yang telah dilakukannya. Jadi tidak ada potongan yang tidak jelas tujuannya dalam pengelolaan dana pihak ketiga tersebut, dan kejelasan ini merupakan salah satu dari bentuk implementasi prinsip amanah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam pengelolaan dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga yang dititipkan nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru akan dialokasikan pada pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

2. Pembiayaan *musyarakah*, adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan bank muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industry/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.
3. Pembiayaan *murabahah*, adalah fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: perdagangan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain).
4. Pembiayaan *istishna*, adalah jual beli dimana seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. *Istishna* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada system pembayarannya, yaitu *istishna* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung (penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).



5. Pembiayaan *salam*, adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian.<sup>2</sup>

Dalam praktek pengelolaannya dapat dilihat dari simulasi berikut:

### **Produk *Mudharabah***

CV. Putra Andalas memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut CV. Putra Andalas mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan total kebutuhan dana Rp. 100.000.000,-.<sup>3</sup>

Setelah dilakukan analisa keuangan, maka disetujui Fasilitas *Mudharabah* oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru kepada CV. Putra Andalas, dengan persyaratan Fasilitas *Mudharabah* sebagai berikut:

Plafond : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 24 bulan

Nisbah bagi hasil : (berdasarkan laba bersih): 20% bank dan 80% nasabah

Obyek bagi hasil : Laba bersih

---

<sup>2</sup> Nidya (Personalia dan sekretaris), *Wawancara*, 2 November 2010, Pekanbaru.

<sup>3</sup> Deki Saputra (Direktur CV. Putra Andalas), *Wawancara*, 6 November 2010, Pekanbaru.

Biaya Administrasi : Rp. 1.000.000,-

Pembayaran bagi hasil : Dilaksanakan setiap akhir bulan

Pengembalian pokok : CV. Putra Andalas wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu.

Laba bersih yang diperoleh oleh CV. Putra Andalas adalah sebesar Rp. 40.000.000,-. Maka CV. Putra Andalas harus membayar kepada Bank Muamalat sebesar:

$$\text{Rp. 100.000.000,-} + \text{Rp. 40.000.000,- (20\%)} = \text{Rp. 108.000.000,-}$$

$$\text{Rp. 108.000.000,-} : 24 = \text{Rp. 4.500.000,-}$$

Jadi, Setiap akhir bulan CV. Putra Andalas harus membayar kepada Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 4.500.000,-

### **Produk *Musyarakah***

CV. Nusa Indah memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya sebesar Rp. 500.000.000,- sementara modal kerja sendiri dari CV. Nusa Indah sebesar Rp. 400.000.000,- atau 80% dari total modal kerja yang diperlukan.<sup>4</sup> Untuk keperluan tersebut CV. Nusa Indah mengajukan fasilitas

---

<sup>4</sup> Elfi Alfandi (Direktur CV. Nusa Indah), *Wawancara*, 6 November 2010, Pekanbaru.

pembiayaan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan total kebutuhan dana Rp. 100.000.000,-

Plafond : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 24 bulan

Nisbah bagi hasil : (berdasarkan laba bersih): 20% bank dan 80% nasabah

Obyek bagi hasil : Laba bersih

Biaya Administrasi : Rp. 1000.000,-

Pembayaran bagi hasil : dilaksanakan setiap akhir bulan

Pengembalian pokok : CV. Nusa Indah wajib mengakumulasikan keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu.

Laba bersih yang diperoleh oleh CV. Nusa Indah adalah sebesar Rp. 35.000.000,-. Maka CV. Nusa Indah harus membayar kepada Bank Muamalat sebesar:

$$\text{Rp. 100.000.000,-} + \text{Rp. 35.000.000,- (20\%)} = \text{Rp. 107.000.000,-}$$

$$\text{Rp. 107.000.000,-} : 24 = \text{Rp. 4.458.333,-}$$

Jadi, Setiap akhir bulan CV. Nusa Indah harus membayar kepada Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 4.458.333,-

Bank mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. Earning Asset (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk:
  - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
  - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)
  - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik*)
  - d. Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.

2. Non Earning Asset (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai
- b. Pinjaman (*qard*)
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Sumber pendapatan bank syari'ah terdiri dari:

- 1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
- 2. Keuntungan atas kontrak jual beli
- 3. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.<sup>5</sup>

Pendapatan-pendapatan tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *op.cit.*

**Tabel 4.2**

**Nisbah Bagi Hasil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru  
per 28/02/2010**

No	Jenis Produk	Bank	Nasabah
1	Tabungan	45	55
2	Deposito 1 bulan	50	50
3	Deposito 3 bulan	49	51
4	Deposito 6 bulan	47	53
5	Deposito 12 bulan	46	54

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000,- bulan Januari 2010 adalah 9,74. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1000,- dana nasabah yang dikelola bank muamalat akan menghasilkan Rp. 9,74 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,74 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu 50% sehingga untuk setiap Rp. 1000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,87 (berarti HI-1000 nasabah = 4,87 rupiah), secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah nasabah}}{100}$$

### Deposito 1 Bulan

Pak Zulkifli menyimpan deposito mudharabah di bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan.<sup>6</sup> Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Zulkifli adalah:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rp. 10.000.000,-}}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

bagi hasil nasabah = Rp. 54.650,-

Jadi pada masa jatuh tempo, Pak Zulkifli akan menerima sebesar Rp. 10.054.650,-.

### Deposito 3 Bulan

Pak Zuchri menyimpan deposito mudharabah di bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 65.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan.<sup>7</sup> Diketahui nisbah deposito 3 bulan 49:51. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Zuchri adalah:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rp. 65.000.000,-}}{1000} \times 10,93 \times \frac{51}{100}$$

bagi hasil nasabah = Rp. 362.329,-

Jadi pada masa jatuh tempo, Pak Zuchri akan menerima sebesar Rp. 65.362.329,-

---

<sup>6</sup> Zulkifli Nasution, *Wawancara*, 5 November 2010, Pekanbaru.

<sup>7</sup> Zuchru Fachdiar Nasution, *Wawancara*, 7 November 2010, Pekanbaru.

### Deposito 6 Bulan

Pak Budi menyimpan deposito mudharabah di bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 30.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan.<sup>8</sup> Diketahui nisbah deposito 6 bulan 47:53. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Budi adalah:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rp. 30.000.000,-}}{1000} \times 10,93 \times \frac{53}{100}$$

bagi hasil nasabah = Rp. 173.787,-

Jadi pada masa jatuh tempo, Pak Budi akan menerima sebesar Rp. 10.173.787,-.

### Deposito 12 Bulan

Pak Despriyanto menyimpan deposito mudharabah di bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 48.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.<sup>9</sup> Diketahui nisbah deposito 12 bulan 46:54. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Despriyanto adalah:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{1000} \times 10,93 \times \frac{54}{100}$$

bagi hasil nasabah = Rp. 283.305,-

Jadi pada masa jatuh tempo, Pak Despriyanto akan menerima sebesar Rp. 10.283.305,-.

---

<sup>8</sup> Budi Prayitno, *Wawancara*, 5 November 2010, Pekanbaru.

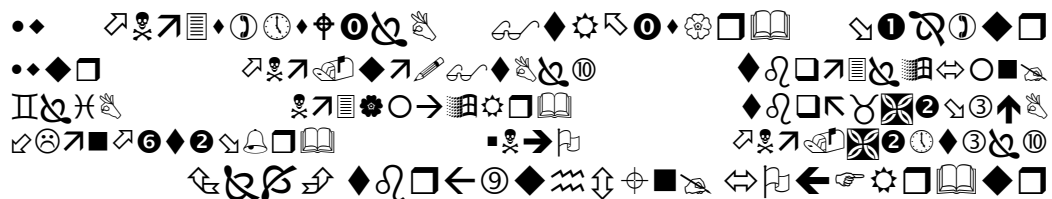
<sup>9</sup> Despriyanto, *Wawancara*, 7 November 2010, Pekanbaru.



## B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru

Sistem operasional PT. Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah Nasional.<sup>10</sup>

Pengelolaan dana pihak ketiga dasarnya merupakan sesuatu yang dianjurkan Allah SWT. Karena mengelola berarti berusaha memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan Allah, dengan berpegang pada prinsip yang telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah : 284, yaitu:



Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Op.Cit.*, hal. 31.

*mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.”<sup>11</sup>*

Dari ayat ini ditegaskan bahwa apa yang ada di bumi dan di langit merupakan kepunyaan Allah SWT. Manusia mempunyai hak untuk mengelola atau memanfaatkan apa saja yang ada di bumi dan di langit. Jadi tugas manusia sebagai hamba Allah adalah memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan-Nya sebaik mungkin.

Jika dilihat dari akad yang digunakan PT. Bank muamalat Indonesia dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah muthalaqah*. Dalam akad *wadi'ah* Bank Muamalat Indonesia memakai akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah kepada pihak bank. Bank Muamalat Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya dan apabila terjadi kerusakan atau mengalami kehilangan bank wajib menggantinya. Jadi jelas dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* ini bank boleh mengelola dana nasabah karena dana tersebut telah mendapat izin dari nasabah untuk dikelola.

Pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. bank muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru pada praktiknya adalah setelah nasabah menyerahkan

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 38.

modalnya kepada pihak bank, kemudian bank akan memanfaatkan modal tersebut. Dalam hal ini memanfaatkan dana tersebut bank bekerjasama dengan nasabah peminjam (pihak ketiga), pihak ketiga tersebut adalah nasabah yang memerlukan dana untuk menjalankan usahanya, dengan kata lain modal dari nasabah pertama disalurkan kepada nasabah kedua dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Dalam hal ini bisa dikatakan memudharabahkan harta mudharabah.

Ulama Hanabilah mengkategorikan *mudharabah* ini termasuk dalam salah satu jenis syirkah (perserikatan).<sup>12</sup> Akan tetapi, jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakna dengan perserikatan.<sup>13</sup>

walaupun terdapat perbedaan dalam pengkategorian, namun semua para ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula pakar yang tidak mempunyai modal untuk melaksanakan usahanya. Atas dasar saling

---

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. 3, hal. 168.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 172.





Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>17</sup> (QS. Al-Baqarah : 198).

QS. Al-Jumu’ah : 10 da QS. Al-Baqarah : 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Kedua ayat di atas secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.<sup>18</sup> Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat–syarat berikut :

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>18</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional.*

Adapun ketentuan-ketentuan yang menyangkut keuntungan adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntunganyang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, *“keuntungan dapat dibayarkan (due) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan”*

b) Hak terhadap keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafii mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

c) Distribusi keuntungan

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal. Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola akan diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

- **Al-Hadits**

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد  
المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به  
بحرا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ  
شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.”<sup>19</sup>(HR. Thabrani)

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بث فيهن البيع الى  
اجل والمقارضة واخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>20</sup>(HR. Ibnu MAjah No. 2280, kitab at-Tijarah)

---

<sup>19</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar fil Halli Ghayatil Ikhtishar*, terj. K. H. Syarifuddin Anwar dan K. H. Mishbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hal. 629.

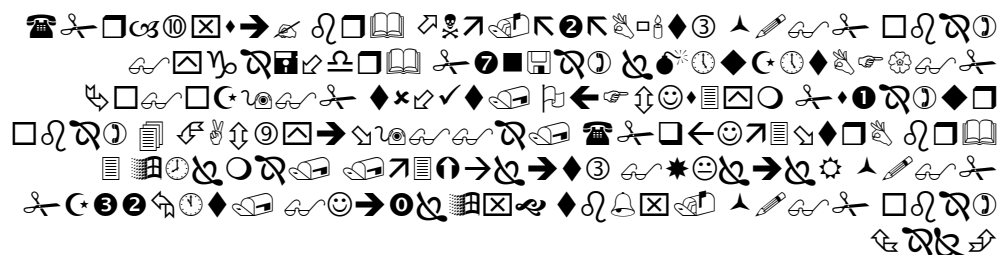
<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 679.

Dalam persoalan muamalah, syari'at Islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Syari'at Islam hanya memberikan prinsip dan criteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemashlahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong-menolong, tidak mempersulit dan dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>21</sup>

Selain menggunakan akd *mudharabah* yakni *mudharabah muthlaqah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru juga menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* dalam pengelolaan dana pihak ketiga.

Tinjauan ekonomi Islam mengenai prinsip *wadi'ah* ini tercantum dalam:

- **Al-Quran**



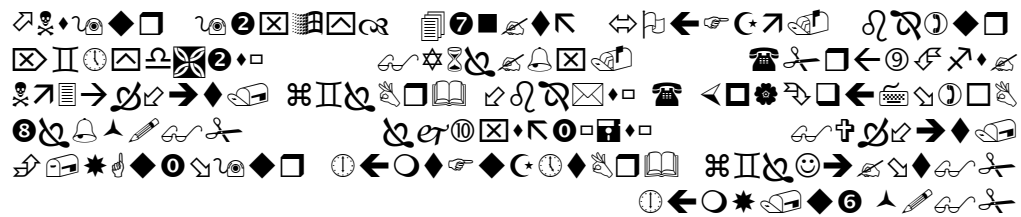
Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.*”

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: LIISAN Kalimah, 2000), cet. 1, hal. 19.



Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>22</sup> (QS. An-Nisaa’ : 58)



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;”<sup>23</sup> (QS. Al-Baqarah : 283)

- **Al-Hadits**

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اد الاءمانة الى من ائتمنك ولا تخن

Artinya: “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,”Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”<sup>24</sup>(HR. Thabrani)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa *wadi’ah* hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling tolong –menolong antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah, fiqh Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw. Sampai

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 69.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>24</sup> Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *op.cit.*, hal. 630.

generasi-generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *'amali* bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.<sup>25</sup>

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad dhamanah* ini, pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.

---

<sup>25</sup> Harun Nasution, *op.cit.*, hal: 246.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prinsip amanah yang dimaksud dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah suatu prinsip yang mengandung unsur kejelasan, keadilan, tidak ada unsur paksaan, adanya kesesuaian antara akad dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Dalam pengelolaan dana pihak ketiga, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* yang dipakai adalah *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan akad *mudharabah* yang dipakai adalah *mudharabah muthlaqah*. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dalam pengelolaan dana pihak ketiga adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan *salam*. Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank yaitu *earning asset* dan *non earning asset*. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana pihak ketiga ini dengan nisbah yang telah disepakati dengan hitungan berdasarkan nilai HI-1000. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaannya jelas dan sesuai dengan syari'at Islam, itu ditandai

dengan kejelasan alokasi pembiayaan dan keadilan dalam perhitungan bagi hasilnya serta ketelitian PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam menganalisa pembiayaan yang diberikan agar tidak ada kesalahan dalam pengalokasian dana serta tidak adanya paksaan terhadap nasabah dalam pengelolaan dana pihak ketiga tersebut.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi prinsip amanah pada PT.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah dapat dibenarkan oleh Hukum Islam. Dalam pengelolaannya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Selain itu akad *wadi'ah* hukumnya adalah boleh dan disunatkan. Disamping itu mengandung prinsip kemashlahatan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong-menolong, tidak mempersulit dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu kebolehan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* juga diterangkan di dalam al-quran dan hadits.

## B. Saran

Pada dasarnya penulis melihat bahwa dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru cukup amanah, penerapannya telah berdasarkan amanah. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulisan memberikan saran:

1. Mengingat bahwa banyak kalangan awam yang menitipkan dana mereka pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru, maka bank harus meningkatkan sosialisasi kepada nasabah tentang pengelolaan dan bagi hasil dari investasi mereka.
2. Benar-benar menjalankan operasionalnya terutama di segi pembiayaan atau pengelolaan dana pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah.
3. Harus lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan dalam pengelolaan dana pihak ketiga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-1.
- Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Araby, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1 Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt.
- Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006, Cet. Ke-1.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), cet. 5.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Edisi. Ke-3. Cet. Ke-1.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2, Dar al-Fikr, tt.
- Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006, Cet 1.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persa 2007, Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/iv/2000 Tentang Tabungan*, (Jakarta: DSN, 2000).
- Firdaus Muhammad, *Edukasi Profesional Syari'ah-Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005, Cet. Ke-1.
- Habib Nazir dan Muh.Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Kaki Langit*, 2004.

Harun Nasution, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. 3.

Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar fil Halli Ghayatil Ikhtishar*, terj. K. H. Syarifuddin Anwar dan K. H. Mishbah Mustafa, Surabaya: Bina Iman, 2007.

Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007, Cet. Ke-1.

Latifa Algaoud, Mervyn Lewis, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi, 2001, Cet. Ke-1.

Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, Cet. Ke-4.

Modul Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tahun 2010.

Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, jilid 5, Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt.

Muhammad Firdaus, *Edukasi Profesional Syari'ah Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. 4.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. Ke-1.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, cet. Ke-2.

Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Lisan Kalimah, 2000, cet. 1.

Slamet Wijono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, cet. 3.

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-1.

Undang-undang Perbankan 1998 (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998),  
Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet.  
5.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo,  
2004, Cet. Ke-3.

Wibowo Edi, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Bogor Selatan: Ghalia  
Indonesia, 2002, Cet. Ke-1.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet,  
2006, cet. 3.



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	56
Tabel 4.2 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	21
------------------	----

## **WAWANCARA**

1. Berapakah jumlah pegawai Bank Muamalat?
2. Berapakah jumlah nasabah dana pihak ketiga pada Bank Muamalat?
3. Apa saja bentuk akad dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru?
4. Bagaimana system bagi hasil dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru?
5. Apa saja bidang yang dibiayai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dalam pengelolaan dana pihak ketiga?
6. Dana pihak ketiga dalam bentuk apa yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru?
7. Berapakah besar nisbah bagi hasil yang diterima nasabah dalam pengelolaan dana pihak ketiga?

## RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Drs. Zainal Mesir (Alm) dan Rusmawarni, S. Pd yang dilahirkan di Merangin pada tanggal 17 Januari 1988. Penulis memulai pendidikan pada tahun 1993 di Taman Kanak-kanak Melur Merangin, dan memperoleh pendidikan formal pertama tahun 1994 di MIN Merangin. Tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Negeri Model Kuok dan lulus tahun 2003. Tahun 2006 penulis menamatkan pendidikan di MAN Kuok dan lulus test di Perguruan Tinggi negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam. Magang penulis dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2010 di Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Kecamatan tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Selama perkuliahan penulis pernah aktif pada Unit Kegiatan Kampus Pramuka (Racana Suska-Etrida).